

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus memperoleh legitimasi atau dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan bisnis. Dalam konteks teori ini, legitimasi merujuk pada persepsi bahwa aktivitas dan praktik perusahaan sesuai dengan nilai-nilai sosial, norma, dan harapan yang ada dalam masyarakat.¹ Dengan kata lain, perusahaan perlu dianggap sebagai entitas yang bertindak secara etis, bertanggung jawab sosial, dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan yang berhasil memperoleh legitimasi cenderung lebih mampu bertahan dalam jangka panjang dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, seperti konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Penerapan teori legitimasi dalam konteks perusahaan melibatkan upaya untuk memperkuat citra dan reputasi perusahaan melalui komunikasi yang jelas dan konsisten tentang nilai-nilai, tujuan, dan praktik perusahaan yang sejalan dengan ekspektasi dan tuntutan masyarakat. Strategi-strategi ini dapat meliputi pelaporan keberlanjutan, keterbukaan dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi dalam inisiatif sosial atau lingkungan yang berdampak positif. Dengan cara ini, perusahaan dapat membangun dan memelihara legitimasi mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat mendukung kelangsungan operasional dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.²

¹ Nur Aisyah Kustiani, “Penerapan Elemen-Elemen Integrated Reporting Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Jakarta : *Politeknik Keuangan Negara STAN*. (2015): 45.

² Deegan, C, “Introduction The Legitimizing effect of social and environmental disclosures-a theoretical foundation”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol 15 No 3, (2002): 282–311.

Teori legitimasi dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa keberadaan dan aktivitas sebuah organisasi harus diakui, disetujui, dan didukung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar organisasi tersebut dapat bertahan dan beroperasi secara efektif dalam lingkungan bisnis. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa perusahaan perlu memperoleh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat, pemerintah, konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan sukses.

Teori legitimasi mengandaikan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada tujuan-tujuan internal, seperti mencapai keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etis mereka. Dengan mempertahankan dan memperkuat legitimasi mereka, organisasi dapat membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, mengurangi risiko reputasi, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang.

Pengungkapan sukarela perusahaan yang menggambarkan kegiatan perusahaan secara berkelanjutan merupakan bagian dari praktik pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Ini mencakup pengungkapan informasi tentang kinerja perusahaan dalam aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG), serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Praktik pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Ini meliputi informasi tentang upaya perusahaan dalam mengurangi jejak lingkungan mereka, mempromosikan kesetaraan dan keberagaman di tempat kerja, berkontribusi pada pembangunan masyarakat, dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip dasar dari teori legitimasi adalah bahwa perusahaan harus memperoleh dukungan dan pengakuan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu, komunikasi dan interaksi dengan berbagai pihak tersebut

menjadi kunci dalam membangun dan memelihara legitimasi perusahaan.

Komunikasi dengan pemegang saham memang penting karena mereka memiliki kepentingan langsung dalam kinerja dan keberhasilan perusahaan. Namun, teori legitimasi mengakui bahwa perusahaan juga harus memperhitungkan kepentingan dan ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mereka untuk memperoleh legitimasi.

Dalam konteks komunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan perlu menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan konsisten tentang praktik bisnis mereka, dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka, serta upaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, perusahaan dapat membangun kepercayaan, meminimalkan ketidakpastian, dan memperoleh dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kelangsungan operasional mereka.

2. ***Integrated Reporting***

a. Definisi *Integrated Reporting*

Integrated reporting atau laporan terintegrasi adalah pendekatan dalam pelaporan perusahaan yang bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan nilai sebuah perusahaan. Tujuan utama dari IR adalah untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan yang komprehensif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai jangka panjang.³ Laporan terintegrasi tidak hanya mencakup informasi keuangan tradisional, seperti laporan laba rugi dan neraca, tetapi juga informasi tentang aspek-aspek non-keuangan seperti kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Ini mencakup hal-hal

³ Z. Azam, Warraich, K. M., & Awan, S. H. "One Report: Bringing Change in Corporate Reporting through Integration Of Financial and Non-Financial Performance Disclosure", *International Journal Of Accounting and Financial Reporting*, (1) (2011): 50-72, Dalam Anis Chariri dan Indira Juniarti "Eksplorasi Elemen Interated Reporting Dalam Annual Reports Perusahaan Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi/Volume 11*, (2017): 411-412.

seperti dampak lingkungan perusahaan, kebijakan sosial dan keberagaman karyawan, inovasi produk, strategi manajemen risiko, dan nilai-nilai perusahaan.

Dengan mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan, laporan terintegrasi membantu pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kinerja dan nilai perusahaan. Ini juga membantu perusahaan untuk menyampaikan narasi yang koheren tentang strategi, tujuan, dan dampaknya terhadap berbagai aspek dalam jangka panjang.

Integrasi informasi dalam laporan terintegrasi juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara faktor-faktor keuangan dan non-keuangan, serta menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini saling mempengaruhi dalam menciptakan nilai jangka panjang. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih berkelanjutan.

Tujuan *Integrated Reporting* (IR) sebagaimana yang tercatat dalam IR Framework adalah untuk menyediakan informasi yang holistik, konsisten, dan terpadu tentang kinerja dan nilai sebuah perusahaan. IR Framework dikembangkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC) sebagai panduan bagi perusahaan dalam menyusun laporan terintegrasi mereka. Berdasarkan *IR Framework*, tujuan utama dari IR adalah:

- 1) Memberikan pemahaman yang menyeluruh, IR bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai jangka panjang. Ini mencakup tidak hanya informasi keuangan, tetapi juga informasi tentang aspek-aspek non-keuangan seperti kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).
- 2) Menyediakan narasi yang koheren, IR bertujuan untuk membantu perusahaan menyampaikan narasi yang koheren tentang strategi, tujuan, dan dampaknya terhadap berbagai aspek. Ini membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik

tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai dalam jangka panjang.

- 3) Mendorong transparansi dan akuntabilitas, IR bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan menyediakan informasi yang lebih terbuka dan terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan mereka..

Integrated reporting (IR) juga memiliki tujuan yang sejalan dengan mengatasi keterbatasan dalam pelaporan keuangan. Konsep IR mengusulkan pendekatan yang holistik dalam pelaporan kinerja perusahaan dengan mengintegrasikan aspek keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan. Hal ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang nilai dan kinerja jangka panjang suatu perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dengan memasukkan faktor-faktor non-keuangan seperti aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG), IR bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana perusahaan memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan demikian, IR dapat membantu mengatasi keterbatasan pelaporan keuangan tradisional yang cenderung fokus pada aspek keuangan semata.

Pelaporan keuangan yang jujur dan sistematis merupakan suatu hal yang telah diajarkan dalam Islam. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra : 35).

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa orang yang berdagang harus menimbang atau menakar barang secara akurat dan adil, tanpa mencurangi pembeli dengan memberikan takaran yang kurang dari yang seharusnya.

Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam, di mana setiap individu diharapkan untuk bertindak dengan adil dan tidak mengeksploitasi orang lain dalam urusan dagang.⁴ Dengan demikian, ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi dagang, dan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan.

International Integrated Reporting Council (IIRC) memberikan panduan dan prinsip-prinsip dalam menyusun laporan terintegrasi (*integrated reporting*). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk membantu perusahaan menyusun laporan yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang nilai dan kinerja perusahaan dari berbagai aspek, termasuk keuangan dan non-keuangan. Beberapa prinsip yang diusulkan oleh IIRC dalam panduan mereka untuk *integrated reporting* antara lain:

- 1) Prinsip integritas, laporan harus mencerminkan gambaran yang jujur, transparan, dan konsisten dari kinerja perusahaan.
- 2) Prinsip kesinambungan, laporan harus menyajikan informasi yang relevan mengenai bagaimana perusahaan mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh, aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).
- 3) Prinsip keterhubungan, laporan harus menjelaskan bagaimana berbagai elemen keuangan dan non-keuangan dari perusahaan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.
- 4) Prinsip materialitas, laporan harus mencakup informasi yang material, yaitu informasi yang dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan.
- 5) Prinsip keterbacaan, laporan harus disusun dengan cara yang mudah dimengerti dan digunakan oleh pemangku kepentingan.

⁴ Alquran, Al-Isra ayat 35, “*al-Quran dan terjemahan: juz 15*”, (Jakarta: Dapertemen RI, PT. Kumudasmoro Grafindo, 2019), 282.

6) Prinsip konteks berkelanjutan, laporan harus dilihat dalam konteks jangka panjang, termasuk cara perusahaan mengelola risiko dan peluang jangka panjang.

b. Indikator *Integrated Reporting*

Dalam praktik *integrated reporting*, terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas dan efektivitas laporan terintegrasi. Beberapa indikator utama yang sering digunakan atau direkomendasikan oleh organisasi seperti *International Integrated Reporting Council (IIRC)* atau *Global Reporting Initiative (GRI)* antara lain:⁵

1) *Organizational overview and external environment.*

Organizational overview memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan tentang konteks di mana organisasi beroperasi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja jangka panjang organisasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang organisasi dan lingkungannya, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung pertanggungjawaban yang lebih baik dari pihak organisasi.

2) *Governance*

Governance memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana organisasi dikelola dan diarahkan, serta untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dengan memperjelas struktur, proses, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, laporan terintegrasi dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

3) *Business Model*

Business Model memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan tentang model bisnis organisasi, termasuk bagaimana organisasi menciptakan nilai jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan memahami model bisnis organisasi, para pemangku

⁵ Wahyuni, E.D, "Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan Integrtded Reporting Terhadap Stock Return", *Jurnal Akuntansi*, 4(1), (2021): 69-79

kepentingan dapat mengidentifikasi peluang dan risiko yang terkait dengan investasi atau keterlibatan dengan organisasi tersebut, serta mendukung pertanggungjawaban yang lebih baik dari pihak organisasi.

4) *Risk and Opportunity*

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dan peluang dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja jangka panjang dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan memahami risiko dan peluang yang dihadapi, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi nilai mereka dan memanfaatkan peluang yang ada, sambil meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.⁶

5) *Strategy And Resource Allocation*

Elemen ini berisi tentang strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dalam waktu jangka pendek, menengah hingga panjang dan bagaimana menjalankan strategi tersebut. Strategi tersebut akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga terdapat alokasi sumber daya dalam rangka implementasi strategi tersebut serta informasi tentang keunggulan kompetitif perusahaan yang dapat berupa informasi inovasi yang digagas perusahaan serta pertimbangan lingkungan dan sosial.

6) *Performance*

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menyajikan informasi yang komprehensif tentang kinerja organisasi, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja jangka panjang dan memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan yang sesuai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja organisasi, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung pertanggungjawaban yang lebih baik dari pihak organisasi.

⁶ Wahyuni, E.D, "Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan Integrtd Reporting Terhadap Stock Return", *Jurnal Akuntansi*, 4(1), (2021): 69-79

7) *Outlook*

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan tentang arah dan prospek masa depan organisasi, serta untuk memperlihatkan komitmen organisasi terhadap perubahan, inovasi, dan keberlanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prospek masa depan organisasi, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung pertanggungjawaban yang lebih baik dari pihak organisasi.

8) *Basis Of Presentation*⁷

Basis of Presentation yang jelas dan konsisten penting dalam memastikan laporan terintegrasi memberikan gambaran yang akurat dan relevan tentang kinerja organisasi serta dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Dengan adanya kerangka kerja yang baik, laporan terintegrasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

PSAK No. 1 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan dalam rangka memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi para pemakai laporan keuangan. Paragraf dua belas dari PSAK No. 1 menyatakan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan selain laporan keuangan utama, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*).

Laporan mengenai lingkungan hidup merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang dampak kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan, seperti emisi polutan, penggunaan sumber daya alam, atau upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungannya.⁸ Dengan menyajikan laporan tambahan seperti

⁷ Wahyuni, E.D, “Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penerapan Integrred Reporting Terhadap Stock Return”, *Jurnal Akuntansi*, 4(1), (2021): 69-79

⁸ Hery. “*Akuntansi dan Rahasia dibaliknya (untuk para manajemen non-akuntansi)*”. (edisi satu, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2019) 145

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung pertanggungjawaban yang lebih baik dari pihak perusahaan.

3. Dewan Komisaris Independen

a. Definisi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah salah satu mekanisme yang umum digunakan dalam praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan dipertimbangkan secara adil dan transparan. Komisaris independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan bisnis atau keuangan yang signifikan dengan perusahaan, sehingga dianggap dapat mempertahankan kemandiriannya dalam mengambil keputusan terkait perusahaan.⁹ Komisaris independen adalah anggota dewan direksi atau badan pengawas perusahaan yang dipilih dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan bisnis atau keuangan yang signifikan dengan perusahaan atau entitas yang terkait dengan perusahaan. Mereka dianggap independen karena mereka tidak memiliki kepentingan yang bersentuhan atau bias dalam mengambil keputusan terkait perusahaan.¹⁰

Komisaris independen dianggap sebagai elemen kunci dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik karena mereka membawa pandangan independen dan pengalaman yang berharga dalam mengawasi kegiatan perusahaan dan menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Keberadaan mereka membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi tindakan Direksi

⁹ Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 170-171.

¹⁰ Islahuzzaman, *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*, Edisi Kesatu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 272.

(manajemen senior) dalam menjalankan operasi sehari-hari perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan strategis yang diambil oleh Direksi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Mereka melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis, risiko-risiko yang terkait, dan dampaknya terhadap keberlanjutan perusahaan. Dengan melakukan pengawasan yang efektif terhadap tindakan Direksi, dewan komisaris membantu memastikan bahwa keputusan perusahaan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ini membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Fungsi dewan komisaris mencakup dua hal yakni:¹¹

- 1) Pengawasan (*Oversight*), dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi kegiatan dan keputusan manajemen senior, termasuk Direksi, untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan strategis, keuangan, risiko, dan kepatuhan.
- 2) Penasehat (*Advisory*), selain pengawasan, dewan komisaris juga berfungsi sebagai penasihat bagi manajemen perusahaan. Mereka memberikan saran dan pandangan yang berharga kepada Direksi dan manajemen senior dalam mengambil keputusan strategis, memecahkan masalah, dan menghadapi tantangan bisnis yang kompleks. Dewan komisaris membawa pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang dapat membantu perusahaan dalam merumuskan dan melaksanakan strategi jangka panjang.

¹¹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Raih Asa Sukses: Jakarta, 2015), 35.

Anggota dewan komisaris harus independen dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang objektif. Mereka harus dapat berfungsi tanpa pengaruh dari manajemen atau pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.¹²

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan, kerjasama, atau afiliasi yang signifikan dengan perusahaan, manajemen senior, atau pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya dalam mengambil keputusan terkait perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris membantu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan perusahaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ini membantu meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kinerja keseluruhan perusahaan serta mengawasi pengungkapan *integrated reporting*.

b. Indikator Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah sebuah badan atau kelompok anggota dewan komisaris yang dipilih dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi atau kepentingan yang signifikan dengan perusahaan. Mereka berfungsi untuk menyediakan pengawasan independen terhadap kegiatan dan keputusan manajemen senior, termasuk Direksi, dan memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan dipertimbangkan dengan baik. Pengukuran komisaris independen dijelaskan sebagai berikut:

¹² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Raih Asa Sukses: Jakarta, 2015), 36.

Tabel 2.1
Skor Komisaris Independen

<i>Range</i>	<i>Score</i>
0% -20%	2
21% -40%	4
41% -60%	6
61% -80%	8
81% and above	10

4. Struktur Kepemilikan

a. Definisi Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang menginvestasikan modalnya kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengambil keputusan dalam perusahaan.¹³ Kepemilikan institusional merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan besar atau institusi-institusi investasi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dana investasi, dana lindung nilai, dan perusahaan investasi lainnya.¹⁴ Kepemilikan institusional seringkali melibatkan jumlah saham yang besar, karena institusi-institusi ini memiliki dana investasi yang signifikan untuk dialokasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Kepemilikan institusional dapat memiliki dampak besar terhadap pergerakan harga saham dan likuiditas pasar. Keputusan pembelian atau penjualan saham oleh institusi besar dapat memicu reaksi pasar yang signifikan.

Pengawasan dari pihak institusional diyakini dapat menjadi faktor yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan institusional yang signifikan seringkali memungkinkan institusi-institusi tersebut untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pengawasan

¹³ I Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2011)

¹⁴ FE Brigham. dan J. F. Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 14*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018)

dan pengelolaan perusahaan.¹⁵ Institusi-institusi investasi sering memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap perusahaan. Mereka juga mungkin memiliki pengalaman dalam berbagai industri dan sektor, yang dapat membantu dalam pemahaman dan penilaian yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan.

Pemilik institusional yang memiliki kepemilikan yang tinggi seringkali memiliki kepentingan yang kuat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif tentang kinerja dan praktek bisnis perusahaan yang mereka investasikan. Oleh karena itu, memberikan informasi yang terintegrasi dan komprehensif, yang dapat diungkapkan melalui *integrated reporting*, menjadi semakin penting dalam konteks ini. *Integrated reporting* menjadi alat yang penting bagi perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi untuk memberikan informasi yang relevan, akurat, dan terintegrasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan secara berkelanjutan.

b. Indikator Struktur Kepemilikan

Kepemilikan saham institusional mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan besar, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dana investasi, bank, dan entitas keuangan lainnya. Institusi-institusi ini membeli saham sebagai bagian dari strategi investasi mereka. Kepemilikan saham institusional sering kali memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan pasar karena jumlah saham yang mereka pegang bisa sangat besar. Pada banyak kasus, keputusan investasi dari institusi besar dapat mempengaruhi harga saham dan sentimen pasar secara keseluruhan. Kepemilikan saham institusional (Wrdoyo dan Veronica, 2013) diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

¹⁵ FE Brigham, dan J. F. Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 14* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)

Kepemilikan Institusional

$$= \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

5. Komite Audit

Komite audit menurut Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Pasal 1) adalah Komite audit adalah sebuah komite independen yang dibentuk oleh dewan direksi suatu perusahaan untuk mengawasi dan mengelola fungsi audit internal dan eksternal perusahaan. Komite ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik akuntansi perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku, bahwa sistem pengendalian internal efektif, dan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan transparan.¹⁶

Komite audit adalah sekelompok anggota dewan direksi perusahaan yang ditunjuk untuk mengawasi fungsi audit internal dan eksternal perusahaan serta memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi dan peraturan keuangan yang berlaku. Anggota komite audit biasanya terdiri dari individu yang independen dan memiliki latar belakang atau keahlian dalam bidang keuangan, akuntansi, atau audit. Tugas-tugas mereka meliputi mengawasi proses audit, meninjau laporan keuangan, mengevaluasi sistem pengendalian internal, dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan yang relevan.¹⁷ Menurut Siti Akhrani Isnania (2018), komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Komite ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi fungsi audit internal dan eksternal perusahaan serta memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi dan peraturan keuangan yang berlaku..¹⁸

¹⁶ Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Undang-undang Nomor 55 /POJK.04 Tahun 2015”, hal 2

¹⁷ Hiro Tugiman, *Komite Audit* (Bandung : PT.Eresco Anggota IKAPI), 6

¹⁸ Siti Akhrani Isnania, “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Reputasi KAP Terhadap Audit Report”, *Akuntansi, ISSN:24606561*,(2018), 42

Ningsih dan Widhiyani (2015) mengemukakan bahwa dewan komisaris biasanya membentuk beberapa komite untuk membantu mereka dalam mengelola berbagai aspek perusahaan. Selain komite audit, ada juga komite lain seperti komite nominasi, komite remunerasi, dan komite risiko. Setiap komite memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.¹⁹ Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses audit internal dan eksternal perusahaan. Mereka memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku.²⁰

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, anggota komite audit paling kurang terdiri dari tiga orang.²¹

Keanggotaan komite audit di Indonesia beragam dan dapat disesuaikan dengan berbagai faktor, termasuk peraturan yang berlaku, ukuran perusahaan, kompleksitas operasional, dan kebutuhan spesifik perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki kebutuhan untuk memiliki komite audit yang lebih besar dengan lebih banyak anggota, sementara perusahaan yang lebih kecil mungkin cukup dengan anggota yang lebih sedikit. Komite audit sering kali membutuhkan anggota yang memiliki keahlian atau pengalaman khusus dalam bidang keuangan, akuntansi, audit,

¹⁹ I Gusti Ayu Puspita Sari Ningsih, Ni Luh Sari Widhiyani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Operasi, Solvabilitas, Dan Komite Audit Pada Audit", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, 12 (2015)

²⁰ Ni Made Sunarsih, "Pengaruh kualitas Auditor, Jumlah Komite Audit Dan Pendidikan Ketua Komite Audit Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Volume*, ISSN : 2528-1216, 2 (2017).

²¹ "Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank", Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009.aspx> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

atau hukum untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan efektif. Dengan anggota yang lebih banyak, komite audit dapat memiliki akses ke beragam keahlian dan pengalaman, yang dapat membantu dalam mengevaluasi berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan dengan lebih komprehensif.²²

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mengacu pada dimensi atau skala dari suatu entitas bisnis, yang dapat diukur dengan berbagai metrik seperti pendapatan, jumlah karyawan, nilai pasar, total aset, atau laba bersih. Secara umum, ukuran perusahaan memberikan gambaran tentang seberapa besar atau kecil suatu perusahaan dalam konteks tertentu.²³ Ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai performa atau status perusahaan dalam berbagai aspek. Artinya, ukuran perusahaan tidak hanya terbatas pada parameter seperti pendapatan, jumlah karyawan, atau nilai pasar, tetapi juga mencakup evaluasi kualitatif dan kuantitatif lainnya.²⁴

Ukuran perusahaan dapat mencakup indikator keuangan seperti tingkat profitabilitas, likuiditas, leverage, dan pertumbuhan pendapatan. Prestasi finansial merupakan ukuran yang penting dalam mengevaluasi kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar cenderung lebih stabil secara finansial karena memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menanggung beban

²² Gede Aditya Cahya Gunarsa., Igam Asri Dwija Putri, “Pengaruh Komite Audit, Independensikomite Audit, Dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lagdi Perusahaan Manufaktur,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 302-8556, 2 (2017), 1679

²³ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 199

²⁴ Erna Ardiana & M Chabachib, “Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2012-2016)” *Diponegoro Journal Of Management*. Vol. 7 No. 2, (2018): 1-14

keuangan, mengatasi tantangan ekonomi, dan membiayai investasi jangka panjang.²⁵

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dimensi atau dimensi tertentu dari perusahaan diukur atau dievaluasi. Ini bisa mencakup parameter seperti pendapatan, jumlah karyawan, nilai pasar, total aset, profitabilitas, pangsa pasar, dan faktor lain yang relevan untuk memahami skala atau dimensi bisnis.²⁶

Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator penting yang digunakan oleh investor untuk menilai aset dan kinerja perusahaan. Hal ini karena ukuran perusahaan memberikan gambaran tentang skala operasi, kapasitas finansial, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki stabilitas finansial yang lebih tinggi karena memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menanggung beban keuangan dan mengatasi tantangan ekonomi. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan seperti pinjaman bank, pembiayaan ekuitas, atau investasi modal ventura karena memiliki aset yang lebih besar dan kekuatan finansial yang lebih besar.²⁷

7. Ukuran KAP

Ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah total karyawan atau jumlah profesional akuntan yang bekerja di dalamnya. KAP yang lebih besar mungkin memiliki tim yang lebih besar untuk melayani klien dengan beragam kebutuhan. Ukuran KAP terbagi atas struktur organisasi yang terdiri atas empat tingkatan utama yakni:²⁸

- a. Partner, dalam KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah individu yang memiliki kepemilikan atau kepemimpinan dalam firma tersebut dan biasanya bertanggung jawab

²⁵ Setyarso Herlambang Darsono, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.4, No.3,(2015),

²⁶ Bambang Riyanto, “Analisis Laporan Keuangan”, Yogyakarta : BPFE (2013)

²⁷ Kusumawardhani, Indra. “Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba”, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol.9, No.1, (2012), h.46

²⁸ Halim Abdul, *Auditing 1 : Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018)

- atas manajemen, pengawasan, dan pelayanan kepada klien. Mereka biasanya merupakan akuntan berlisensi yang memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam bidang akuntansi, audit, pajak, atau konsultasi keuangan.
- b. Manajer, merupakan individu profesional yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional dan teknis dalam firma. Mereka biasanya memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang akuntansi, audit, pajak, atau konsultasi keuangan, dan sering kali memegang lisensi yang sesuai dalam profesi mereka..
 - c. Akuntan senior, merupakan profesional dengan tingkat pengalaman yang signifikan dalam bidang akuntansi, audit, pajak, atau konsultasi keuangan. Mereka biasanya memiliki kualifikasi akademis dan lisensi yang sesuai dalam profesi mereka, serta memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk mengambil peran yang lebih bertanggung jawab dalam firma.
 - d. Akuntan junior, adalah profesional baru atau dengan tingkat pengalaman yang relatif rendah dalam bidang akuntansi, audit, pajak, atau konsultasi keuangan. Mereka biasanya merupakan lulusan baru atau memiliki pengalaman kerja kurang dari beberapa tahun dalam industri akuntansi.

Ukuran KAP sebagai proksi kualitas dengan membedakan KAP menjadi KAP besar (*Big Four Accounting Firms*) dan KAP kecil (*Non Big Four Accounting Firms*). Indikator ukuran KAP tersebut dilakukan berdasarkan jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah rekan/anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh. Kategori KAP *Big Four* di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Haryanto Sahari dan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- b. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Sidharta dan Wijaya.
- c. KAP Ernest and Young, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
- d. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanakota dan Osman Bing Satrio.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 359/KMK.06/2003 mengatur tentang kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab auditor eksternal dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas memiliki batasan²⁹ Masa jabatan atau periode ini biasanya menetapkan batas waktu berapa lama sebuah firma audit atau auditor eksternal dapat melayani suatu entitas tertentu sebelum perlu dilakukan rotasi atau pergantian auditor. Hal ini bertujuan untuk memastikan independensi dan objektivitas auditor, serta untuk mencegah konflik kepentingan atau bias yang mungkin timbul akibat hubungan yang terlalu lama antara auditor dan klien.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

1. Rejeki & Ahmar, (2022). dengan judul “Pentingnya Penerapan *Integrated Reporting*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Tatakelola Perusahaan (*Good corporat Governance*) terhadap pentingnya penerapan *Integrated Reporting*. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur review yang berasal dari 20 jurnal/artikel yang telah dipublikasikan. Pencarian literatur melalui database elektronik seperti Google Scholar, ProQuest, Springer, Knowledge Map, Mendeley, Schi Hub, Science Direct dan sebagainya. Kata kunci yang digunakan adalah “Tata Kelola Perusahaan”, “*Good Corporate Governance*” dan “*Integrated Reporting*”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP kesemuanya berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Namun

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 359/KMK.06/2003.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/359~kmk.06~2003kep.htm> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/KMK.01/2008.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/359~kmk.06~2003kep.htm> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

secara parsial hanya Ukuran Perusahaan yang berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.³¹

2. Adiwibowo & Ifnapiya (2020) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan Dengan Rerangka *Integrated Reporting*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh audit komite, proporsi komisaris independen, dan struktur kepemilikan pada tingkat penyelarasan laporan tahunan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini meliputi 69 perusahaan manufaktur di sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan memperoleh 57 data. Metode analisis menggunakan Analisis model regresi linier berganda diolah dan dianalisis menggunakan IBM Program Paket Statistik Ilmu Sosial (SPSS) versi 25. Hasilnya menunjukkan hal itu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat keselarasan tahunan laporan dengan kerangka pelaporan terintegrasi dan komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelarasan laporan tahunan. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing secara bersama-sama mempengaruhi tingkat keselarasan tahunan laporan.³²
3. Kurnianto *et al* (2020), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Integrated Reporting*”. Informasi keuangan yang selama ini menjadi alat analisis sekaligus pertanggungjawaban utama kepada investor dirasa tidak mampu memenuhi tuntutan investor, terutama akan informasi non-finansial. *Integrated reporting* (IR) hadir sebagai suatu

³¹ Rejeki, D., & Ahmar, N, “Studi Literatur Review : Pentingnya Penerapan *Integrated Reporting* (Ir)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(3), (2022): 151-163.

³² Adiwibowo, & Ifnapiya, F, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting*”, *Jurnal Ekopreneur*, 2(1), (2020): 76–92.

laporan terintegrasi yang menggabungkan informasi finansial dan non-finansial ke dalam suatu laporan yang mampu menyajikan informasi secara komprehensif bagi penggunaannya. Penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP), tekanan pemangku kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit terhadap IR. Perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai objek penelitian ini karena dinilai memiliki informasi yang kompleks dalam operasinya. Melalui teknik *purposive sampling*, terpilih 116 sampel selama tahun amatan 2016-2017 yang diolah dengan analisis regresi linier berganda pada alat analisis Eviews 8. Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, rapat komite audit dan otoritas komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap (IR). Hal ini menunjukkan perusahaan akan memaksimalkan praktik IR apabila komite audit memiliki frekuensi rapat yang tinggi serta diperluasnya otoritas dari komite audit. Sementara, ukuran KAP dan tekanan pemangku kepentingan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR.³³

4. Lasdi & Oematan, (2021), dengan judul “*The Effect Of Corporate Governance Mechanism, Stakeholder Pressure, And Profitability On Integrated Reporting*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan, tekanan pemangku kepentingan, dan profitabilitas terhadap pelaporan terintegrasi, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020 dengan metode *purposive sampling* sebagai metode pengumpulan sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pelaporan terintegrasi. Sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap pelaporan terintegrasi.

³³ A Kurnianto, Purwohedi, U., & Prihatni, R, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Integrated Reporting” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), (2020): 16 - 30.

Selain itu, tekanan pemangku kepentingan dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi.³⁴

5. Yulyan *et al.*, (2021), dengan judul “*The Influences of Good Corporate Governance and Company Age on Integrated Reporting Implementation*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan umur perusahaan terhadap penerapan pelaporan terintegrasi. Struktur tata kelola perusahaan mengacu pada dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kehadiran rapat, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Beberapa perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 hingga 2018 dipilih melalui teknik purposive sampling sebagai populasi penelitian ini. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel penelitian yang terpilih sebanyak 44 dari 132 data. Metode kuantitatif dengan statistik deskriptif dipilih sebagai desain penelitian, dan juga memperoleh data sekunder dari laporan tahunan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan independen, serta umur dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap penerapan pelaporan terintegrasi. Sebaliknya jumlah komite audit dan kehadiran rapat tidak berpengaruh terhadap penerapan pelaporan terintegrasi. Terakhir, dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, kehadiran rapat, umur dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol secara bersama-sama mempengaruhi penerapan pelaporan terintegrasi.³⁵
6. Prawesti, (2018), dengan judul “Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas Dan Komite Audit Terhadap *Integrated Reporting*”. Banyak kasus manipulasi laporan keuangan yang menjadi penyebab munculnya laporan non-keuangan seperti pelaporan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan, profitabilitas dan

³⁴ Lasdi Lodovicus & Elisabeth Listiyani Oematan, “The Effect Of Corporate Governance Mechanism, Stakeholder Pressure, And Profitability On Integrated Reporting” *JAJA*, 8(2), (2021): 117-133.

³⁵ Yulyan *et al.*, “The Influences of Good Corporate Governance and Company Age on Integrated Reporting Implementation” *Journal of Accounting Auditing and Business*, (2021)

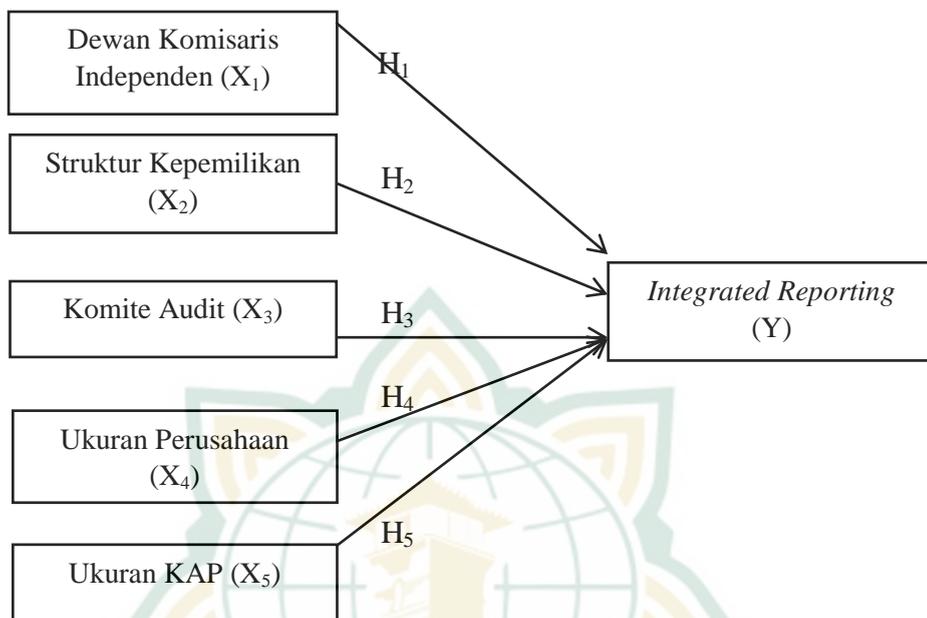
komite audit pelaporan terintegrasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45 dengan waktu penelitian 2014-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan terintegrasi karena semakin lama perusahaan beroperasi, semakin besar pula asimetri informasinya terjadi di dalam perusahaan, sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi salah satunya mereka pelaporan terintegrasi, profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh pelaporan terintegrasi.³⁶

C. Kerangka Berfikir

Dewan Komisaris Independen dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi dan kebijakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Struktur kepemilikan perusahaan, apakah mayoritas saham dimiliki oleh pemegang saham institusional atau individu, dapat mempengaruhi fokus perusahaan terhadap integrasi isu-isu berkelanjutan dalam pelaporan. Komite Audit bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan praktik berkelanjutan.

Ukuran perusahaan dapat memengaruhi sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan laporan terintegrasi. Kantor akuntansi publik yang lebih besar dan lebih berpengalaman mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan tenaga ahli untuk mendukung klien dalam mengembangkan laporan berkelanjutan.

³⁶ Prawesti, D. A, "Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Komite Audit Terhadap Integrated Reporting" *Jurnal Eksos*, No. 2, (2020)



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.³⁷ Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Integrated Reporting*

Dewan Komisaris yang efektif dan berkomitmen dapat memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*) dalam sebuah perusahaan. Dewan Komisaris yang memahami pentingnya isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan isu-isu ini ke dalam strategi bisnis dan pelaporan. Mereka dapat memastikan bahwa laporan terintegrasi mencerminkan dengan baik komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. (Bandung: Alfabeta, 2016)

Dewan komisaris independen yang efektif dapat meningkatkan praktik pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*) karena memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparan dan akuntabel. Hal ini terkait dengan teori legitimasi, dimana perusahaan berusaha untuk mempertahankan legitimasinya dengan menunjukkan bahwa praktik mereka sesuai dengan harapan masyarakat dalam konteks ini, keberadaan dewan komisaris independen dapat memberikan legitimasi tambahan terhadap praktik pelaporan terintegrasi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sunardi & Suherman, 2020) dan (Rejeki & Amar, 2022) menunjukkan bahwa DKI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan terintegrasi.³⁸ Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Damayanti, 2022) dimana kehadiran dewan komisaris mampu memberikan pengaruh positif pada *integrated reporting*. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap *Integrated Reporting*

2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Integrated Reporting*

Pemegang saham institusional, seperti dana pensiun dan dana investasi institusi, cenderung memiliki komitmen jangka panjang terhadap investasi mereka. Mereka sering berfokus pada kinerja jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki basis pemegang saham institusional yang kuat mungkin lebih cenderung menerima tekanan untuk melibatkan diri dalam praktik pelaporan terintegrasi.

Pemegang saham institusional yang aktif dan berpengaruh cenderung mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik pelaporan terintegrasi. Mereka melakukannya karena memiliki kepentingan jangka panjang

³⁸ Sunardi, N., & Suherman, A., "The Effect of Independent Commissioners on Integrated Reporting in Indonesia" *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(4), (2020): 392–407. doi: 10.7771/1540-7780.1288.

dalam kinerja dan reputasi perusahaan. Dalam teori legitimasi, tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan legitimasi mereka dimata pemegang saham institusional yang memiliki pengaruh besar dalam pasar. Dengan memperbaiki praktik pelaporan terintegrasi, perusahaan dapat mengukuhkan legitimasinya diantara pemegang saham istitusional, yang pada gilirannya dapat membantu mempertahankan kepercayaan dan dukungan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila & Rusbin, 2022) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif pada *integrated reporting*. Hal tersebut sejalandengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiharto, 2022) dan (Rahmayuningsih, 2021)³⁹ yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap *integrated reporting*.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Struktur Kepemilikan Berpengaruh Positif Terhadap *Integrated Reporting*

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Integrated Reporting*

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Ketika komite ini memahami pentingnya pelaporan terintegrasi dan isu-isu berkelanjutan, mereka dapat memastikan bahwa informasi berkelanjutan yang disertakan dalam laporan terintegrasi sesuai dengan standar yang tinggi dan bahwa laporan tersebut mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat. Komite Audit dapat mendampingi tim manajemen perusahaan dalam mengembangkan laporan terintegrasi dengan memberikan wawasan dan perspektif independen. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa laporan tersebut mencakup isu-isu yang relevan dan signifikan bagi perusahaan.

Komite audit memainkan peran penting dalam mendorong penerapan *integrated reporting* yang pada gilirannya berkaitan erat dengan teori legitimasi. Dngan

³⁹ H Rahayuningsih,. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Integrated Reporting*, (2019): 1–25.

memastikan transparansi, akurasi, dan keterbukaan informasi keuangan serta non-keuangan. Komite audit membantu perusahaan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin menuntut laporan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa organisasi harus beroperasi sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat untuk memertahankan dan meningkatkan legitimasi mereka. Dengan menyediakan laporan terintegrasi yang mencerminkan kinerja keuangan social dan lingkungan secara holistic, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Akibatnya perusahaan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pemangku kepentingan tetapi juga memperkuat reputasi dan legitimasi mereka di mata public. Komite audit, dengan fungsi pengawasan dan penjaminannya memastikan bahwa proses penyusunan *integrated reporting* dilakukan dengan standar yang tinggi, sehingga mendukung keberlanjutan dan akuntabilitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Ahmad dan, 2020) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *integrated reporting*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian (prameisella , 2023) dan (Rejeki & Amar, 2022) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif pada *integrated reporting*.⁴⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap *Integrated Reporting*

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Integrated Reporting*

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk anggaran, personel, dan teknologi yang dapat dialokasikan untuk pengembangan dan pelaporan terintegrasi. Perusahaan besar

⁴⁰ D Rejeki & Ahmar, N, “Studi Literatur Review : Pentingnya Penerapan *Integrated Reporting (Ir)*”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(3), (2022): 151-163.

memiliki operasi yang lebih kompleks dan beragam. Ini berarti mereka memiliki akses ke data yang lebih kaya dan beragam tentang berbagai aspek bisnis mereka, termasuk aspek-aspek berkelanjutan seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Data yang lebih lengkap memungkinkan perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih relevan dalam laporan terintegrasi.

Sesuai dengan teori legitimasi, organisasi berusaha untuk beroperasi sesuai dengan norma dan harapan masyarakat guna mempertahankan legitimasi mereka. Perusahaan besar, karena visibilitas dan dampaknya yang lebih luas, menghadapi tekanan yang lebih tinggi dari pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyediakan *integrated reporting*, perusahaan besar dapat memperlihatkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan serta legitimasi di mata publik. Selain itu, laporan terintegrasi memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan, yang penting untuk memenuhi tuntutan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan yang lebih besar mendorong penerapan *integrated reporting* yang lebih baik, yang sejalan dengan upaya perusahaan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan menjaga legitimasi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rejeki & Amar, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *integrated reporting*.⁴¹ Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2021) dan (Rahmayuningsih, 2021) yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan mampu memberikan pengaruh positif pada *integrated reporting*.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap *Integrated Reporting*

⁴¹ D Rejeki, & Ahmar, N, “Studi Literatur Review : Pentingnya Penerapan *Integrated Reporting (Ir)*”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(3), (2022): 151-163.

5. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Integrated Reporting*

Kantor akuntan publik yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk staf yang terlatih, teknologi, dan infrastruktur yang lebih canggih. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan yang lebih kuat dalam pengembangan dan verifikasi laporan terintegrasi. KAP yang lebih besar sering memiliki tim ahli keberlanjutan yang khusus terlatih dalam isu-isu berkelanjutan. Tim ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak berkelanjutan dengan lebih akurat dan mendalam.

Menurut teori legitimasi, organisasi berusaha untuk beroperasi sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku di masyarakat guna mempertahankan legitimasi mereka. Dengan melibatkan KAP besar, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan mereka. Laporan terintegrasi yang disusun dengan bantuan KAP besar mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan secara komprehensif, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pemangku kepentingan tetapi juga memperkuat reputasi dan legitimasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, ukuran KAP yang lebih besar berkontribusi pada kualitas dan keandalan *integrated reporting*, yang mendukung upaya perusahaan dalam menjaga legitimasi dan membangun kepercayaan dengan masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurnianti, 2020) menunjukkan hasil bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif pada *integrated reporting*.⁴² Penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Ahmad, 2017) dan (Mardiah, 2020) dimana ukuran KAP berpengaruh secara positif pada *integrated reporting*. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁴² A Kurnianto, Purwohedi, U., & Prihatni, R, "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi *Integrated Reporting*", *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), (2020): 16 - 30.

**H₅ : Ukuran Kantor Akuntan Publik Berpengaruh
Positif Terhadap *Integrated Reporting***

